

BAB VI

KESIMPULAN

Penelitian ini menelaah peran media dalam dua peristiwa besar di Indonesia, yaitu Gerakan Tentara Kandjeng Nabi Muhammad (TKNM) pada tahun 1918 dan Aksi Bela Islam 212 pada tahun 2016–2019. Meskipun berlangsung dalam rentang waktu yang sangat berbeda, keduanya menunjukkan pola yang serupa dalam hal penggunaan media sebagai alat strategis untuk menyebarkan informasi, membentuk narasi, dan memobilisasi massa. Temuan ini menunjukkan adanya evolusi peran media dari masa kolonial menuju era digital, di mana perubahan medium turut memengaruhi bentuk dan daya jangkau gerakan sosial-keagamaan.

Pada era TKNM, media cetak menjadi alat komunikasi utama. Surat kabar seperti *Oetoesan Hindia* dimanfaatkan sebagai medium advokasi untuk menyuarakan protes terhadap artikel kontroversial yang diterbitkan oleh *Djawi Hisworo*, yang dianggap menghina Nabi Muhammad. Peran media cetak dalam konteks ini bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pemantik kesadaran kolektif, khususnya di kalangan masyarakat terpelajar. Di masa kolonial, kehadiran media cetak merupakan sesuatu yang besar karena media cetak menghubungkan antar individu meskipun mereka tidak saling mengenal. Ben Anderson mengemukakannya dengan istilah “*Print-capitalism*” yang menjelaskan pesatnya perkembangan kapitalisme cetak (media cetak) mengikat para pembacanya ke dalam komunitas imajiner dan merasa menjadi bagian dari kelompok yang sama karena membaca suatu bacaan yang sama di waktu sama.

Sementara itu, Aksi Bela Islam 212 berlangsung di tengah kemajuan teknologi informasi, di mana media sosial memainkan peran sentral dalam proses mobilisasi. Platform digital seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *WhatsApp* memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan partisipatif. Model komunikasi yang interaktif dan desentralistik memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga produsen informasi. Partisipasi aktif dalam menyebarkan, mengomentari, dan membingkai narasi gerakan mempercepat proses mobilisasi sekaligus memperkuat solidaritas antar kelompok pendukung.

Perbedaan temporal antara kedua peristiwa ini juga menunjukkan perbedaan jangkauan dan efek media. Media cetak pada masa TKNM, meski terbatas, menjadi instrumen penting dalam pembentukan embrio pergerakan nasional. Abad ke-21, menghadirkan media yang lebih beragam, memungkinkan jangkauan informasi yang lebih masif dan melintasi batas geografis dan waktu. Di sisi lain, kecepatan arus informasi di era digital juga membawa risiko baru, seperti penyebaran hoaks, bias konfirmasi, dan polarisasi sosial-politik.

Narasi keagamaan menjadi elemen sentral dalam kedua gerakan ini. TKNM mengangkat isu penghinaan terhadap agama sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan kolonial dan alat konsolidasi identitas keislaman. Aksi Bela Islam 212 juga menggunakan isu penistaan agama sebagai pemantik, namun gerakan ini berkembang dalam konteks politik kontemporer yang sarat dengan kepentingan elektoral. Berbeda dengan masa kolonial, gerakan ini dihadapkan pada tantangan arus informasi yang tak terkendali, munculnya disinformasi, serta *framing* yang

berbeda dari berbagai media arus utama seperti Metro TV dan tvOne, yang memperkuat segmentasi persepsi publik.

Transformasi peran media dari masa ke masa mencerminkan perubahan pola komunikasi gerakan sosial: dari model komunikasi *top-down* yang dikendalikan oleh elite gerakan seperti dalam TKNM, menuju pola *bottom-up* yang lebih demokratis dan partisipatif dalam Aksi 212. Perubahan ini memberikan ruang yang lebih besar bagi publik dalam membentuk wacana kolektif, namun juga memperbesar potensi disinformasi dan manipulasi opini.

Analisis ini dapat menyimpulkan bahwa media dalam lintasan sejarah Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi semata, tetapi juga sebagai aktor sosial-politik yang turut membentuk arah gerakan massa, memproduksi makna, dan mengonstruksi realitas. Baik dalam konteks perjuangan melawan kolonialisme, maupun dalam kontestasi politik demokratis, media telah menjadi ruang artikulasi kepentingan ideologis, keagamaan, dan kebangsaan.

Pasca peristiwa Aksi Bela Islam 212, penting untuk merefleksikan kembali arah gerakan sosial-keagamaan dalam kerangka keutuhan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara, memiliki relevansi historis dan normatif yang tak tergantikan. Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, dan sila ketiga, *Persatuan Indonesia*, menyediakan fondasi etik bagi penyelesaian konflik identitas yang berbasis agama dan etnis. Dalam konteks Aksi 212, munculnya narasi sektarian dan eksklusivisme identitas menjadi tantangan nyata yang dapat mengancam semangat kebangsaan bila tidak ditanggapi secara arif dan inklusif.

Pengalaman sejarah mengajarkan bahwa semangat keagamaan harus disalurkan dalam bingkai kebangsaan, bukan dalam antagonisme ideologis yang mengarah pada disintegrasi. Pancasila bukan instrumen untuk membungkam ekspresi keagamaan, melainkan jembatan yang memungkinkan pluralitas tumbuh dalam semangat persatuan. TKNM gagal melembagakan perjuangannya menjadi gerakan politik jangka panjang karena kehilangan arah dan legitimasi internal. Adapun Aksi 212 menghadapi tantangan serupa yaitu mampu bertransformasi menjadi kekuatan konstruktif dalam demokrasi, atau hanya menjadi gerakan yang berpotensi menyisakan polarisasi.

Oleh karena itu, refleksi sejarah atas dua peristiwa ini menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai ruang dialog terbuka antara agama dan masyarakat, serta sebagai dasar ideologis dalam membangun tatanan demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkeadaban. Indonesia sebagai negara-bangsa yang plural harus terus merawat konsensus kebangsaan yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Bukan dengan menegaskan identitas partikular, tetapi dengan merangkainya dalam satu simpul ideologis: *Bhinneka Tunggal Ika*.

